

Surat Kabar : Jurnal Nasional
Subyek : Pengelolaan Pesisir

Edisi : 4 Maret 2009
Halaman : 12

Pembalakan dan Jaring Apung Hambat Pengelolaan Pesisir by : Stevie Saputra

Kemiskinan masyarakat pesisir berpengaruh besar dalam masalah tersebut.

Pengelolaan pesisir di Kabupaten Cilacap terhambat oleh konflik kepentingan antarsektor dan eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Dalam hal ini, mencakup persoalan penggunaan jaring apung oleh nelayan dan pembalakan hutan mangrove oleh sebagian masyarakat pesisir.

Sementara hambatan lain yang cukup penting adalah minimnya peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya pesisir, termasuk persoalan status tanah pesisir yang notabene milik negara. Hal ini diyakini dipicu oleh kemiskinan masyarakat pesisir yang berpengaruh besar dalam penanganan masalah tersebut.

Terkait masalah penataan ruang laut dan pesisir, Pemkab Cilacap telah mengupayakan cara eliminasi konflik pemanfaatan ruang di kawasan laut dan pesisir antara negara dan masyarakat. Selain itu, melakukan pengendalian laut di pantai, mitigasi bencana di pesisir, serta rehabilitasi ekosistem mangrove dan terumbu karang secara terpadu.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Cilacap Moch Harnanto, Selasa (3/3) kemarin, mengakui sebagian besar nelayan hingga kini masih menggunakan jaring apung dalam menangkap ikan. Padahal, alat tangkap jenis ini diketahui sangat tidak ramah lingkungan dan mengancam keberlangsungan biota laut, yang pada akhirnya merugikan kehidupan mereka sendiri.

Ancaman bagi biota laut ini semakin nyata, menyusul masih maraknya pembalakan hutan mangrove khususnya di kawasan Segara Anakan. "Sementara, hutan mangrove Cilacap merupakan satu-satunya yang ada di pesisir selatan Jawa dan merupakan tempat pemijahan ikan-ikan kecil sebelum mereka kembali ke perairan lepas Samudra Hindia," kata Harnanto.

Hal senada juga disampaikan Wakil Administratur Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Banyumas Barat, Hilman Firmansyah. Pihaknya telah berupaya maksimal menangani permasalahan tersebut, tapi masih saja ada sebagian masyarakat melakukan pembalakan.

"Kondisi lahan yang gundul karena pembalakan sangat terlihat di wilayah Pulau Nusakambangan bagian barat. Letaknya yang jauh dan hanya dapat ditempuh dengan jalur air, menyulitkan kami mengawasi secara rutin," kata Hilman.

Program yang dianggap efektif adalah melakukan kemitraan dengan masyarakat sekitar melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Untuk masyarakat di pesisir pantai, dirancang program pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan hutan produksi. Selain itu, mengembangkan kultur kewirausahaan dan penguatan lembaga keuangan mikro. **Steve Saputra**

"Setelah sosialisasi ini, diharapkan semakin banyak pengusaha yang mengajukan izin," katanya. Yeniarti menjelaskan, air minum yang tercemar bakteri sangat berbahaya karena bisa menyebabkan berbagai penyakit, seperti diare, typhus, kholera, disentri, juga keracunan logam berat. Untuk itu, Kasudin Kesmas mengharapkan masyarakat agar lebih selektif dalam mengonsumsi air yang diminumnya. "Jangan mudah terkecoh dengan harga murah," ujarnya. c85

